

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS MEBIDANGROKAT)**

**Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**ABSTRACT**

*Kemajuan suatu daerah terlihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Perlunya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 3E (Efisien, Efektif dan Ekonomis) agar Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dapat lebih mandiri dan tidak ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membangun daerahnya. Meskipun kondisi geografik wilayah Pemerintah Kabupaten dan Kota berbeda-beda, tetapi memiliki potensi alam yang bisa dikelola dalam menghasilkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparan sangat perlu diterapkan dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara. Jadi pemerintah kabupaten dan kota harus segera membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang optimal.*

**Kata Kunci:** Pendapatan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, PDRB

**I. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan berfokus pada sektor strategis dan potensial pada wilayah baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berikut ini Grafik LRA dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2017(Dalam Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
Medan	4.492.575.344.846	139.739.210.000.000
Binjai	1.019.170.635.604	7.309.570.000.000
Deli Serdang	3.332.337.760.502	64.991.870.000.000
Serdang Bedagai	1.586.778.177.706	17.516.430.000.000
Langkat	2.311.283.153.445	26.823.480.000.000
Karro	1.463.205.993.000	13.145.850.000.000

Sumber : BPS Sumut.go.id, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh untuk sementara bahwa realisasi pendapatan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akan Tetapi besarnya pendapatan daerah tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya untuk Medan, Deli serdang, Langkat dan Karo. Meskipun pendapatan daerah yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan

penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana transfer yang digunakan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah.

Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Penelitian ini penting dilakukan sebagai salah satu pengukuran kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Jadi peneliti ingin menganalisis bagaimana dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah, apakah dapat berguna secara efisien dan optimal dalam memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten dan kota yaitu Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo dan Langkat di Sumatera Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dikemukakan para ekonom dengan menggunakan sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan suatu indikator. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

### **B. Laporan Keuangan**

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Satandar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

### **C. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

### **D. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

### **E. Rasio Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RaKemKD) :

$$= (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100\%$$

#### **2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ini membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau propinsi.

Rasio Ketergantungan keuangan daerah (RaKetKD)

$$= (\text{Pendapatan Transfer} / \text{Total Pendapatan daerah}) \times 100\%$$

### 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio yang membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Nilai Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efektif : > 100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup Efektif : 90% - 99%
4. Kurang Efektif : 75% - 89%
5. Tidak efektif : < 75%

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

$$= (\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}) \times 100\%$$

### 4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio dengan melihat kinerja pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Jika pertumbuhan pendapatan bersifat positif maka cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (APPD)

$$= \text{Pendapatan Daerah Thn (t)} - \text{Pendapatan Daerah Thn (t-1)} / \text{Pendapatan Daerah Thn (t)}$$

### 5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

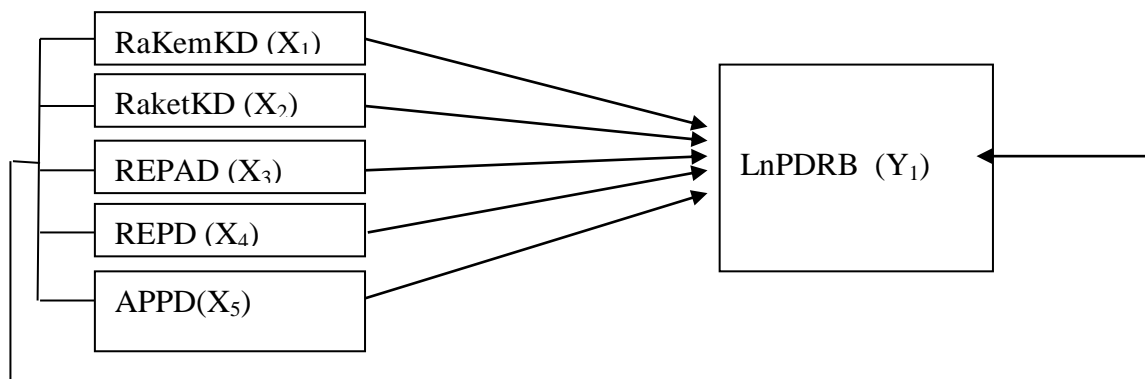
Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik jika angka rasio mencapai minimal 1 atau 100%.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah (REPD)

$$= (\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} / \text{Target Penerimaan Pajak Daerah}) \times 100\%$$

### F. Kerangka Konseptual

Pembangunan yang optimal tergantung besarnya pendapatan daerah dan peningkatan pertumbuhan daerahnya, terkadang pemerintah kota dan kabupaten masih meminta bantuan dana transfer dari pusat. Karena masih rendahnya pendapatan daerah pemerintah tersebut sehingga tingkat kemandirian daerah itu masih rendah. Peneliti ingin menganalisis pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah terhadap PDRB di pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk melihat dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan Regresi Berganda, dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan program SPSS versi 17. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 RaKemKD + \beta_2 RaKetKD + \beta_3 REPAD + \beta_4 REPD + \beta_5 APPD + e$$

Keterangan:

PDRB ( $Y_1$ )	: Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,dan5}$	: Koefisien Regresi $X_{1,2,3,4,dan5}$
RaKemKD ( $X_1$ )	: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
RaKetKD ( $X_2$ )	: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
REPAD ( $X_3$ )	: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
REPD ( $X_4$ )	: Rasio Efektivitas Pajak Daerah
APPD ( $X_5$ )	: Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah
e	: erorr

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

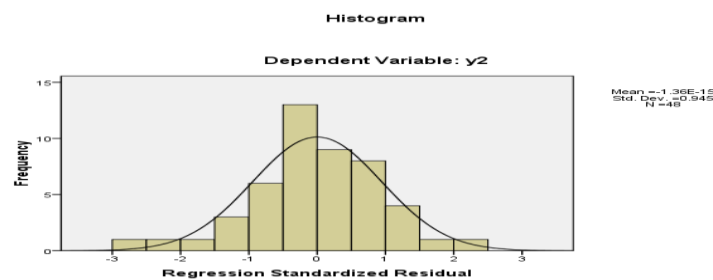
#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengujian Asumsi Klasik

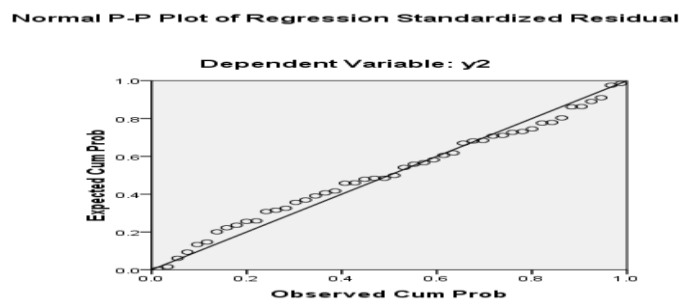
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### a) Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar histogram dan normal P-P Plot of Regression Standardized Residual adalah



Gambar 4.1 Histogram



Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data diolah, 2021

Pada Tampilan grafik histogram, data distribusi nilai residual menunjukkan berdistribusi normal, hal ini dinyatakan pada gambar berbentuk bel yang hampir sempurna (simetris). Demikian juga pada norma probability plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan residual berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnof (*1-sampelK-Stest*). dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut adalah

**Tabel 4.1. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12340768
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.062
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.476
Asymp. Sig. (2-tailed)		.977

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.476 dan tidak signifikan pada  $\alpha = 0.05$  (asyp.Sig = 0.977 > 0.05) sehingga hipotesis  $H_0$  diterima, yang mengatakan data residual berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan nilai *cut off* yang umumnya digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas apabila nilai *Tolerance*  $\geq 0.10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\leq 10$ .

**Tabel 4.2 Collinearity Statistics**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
x1	.361	2.767
x2	.370	2.704
x3	.635	1.574
x4	.619	1.616
x5	.977	1.023

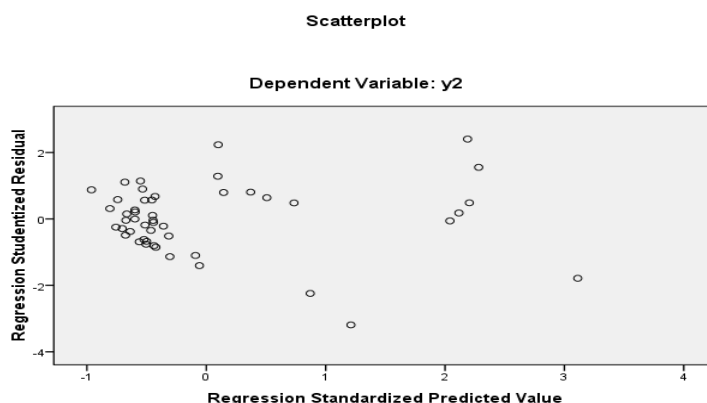
Sumber : Data diolah, 2021

Hasil uji statistik nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10, dan demikian juga hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini di grafik scatterplots pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.





Sumber: Data diolah, 2021

**Gambar 4.3. Scatterplot**

#### 4). Uji Autokorelasi

Mendeteksi uji autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin waston dengan kriteria jika angka DW diantara -2 sampai + 2 maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.3 Uji Durbin Waston Model Summary<sup>a</sup>**

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.895	71.582	5	42	.000	1.929

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

b. Dependent Variable: y2

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai Durbin Waston sebesar 1.929, maka angka DW berada diantara -2 sampai +2 hal ini tidak terjadi autokorelasi.

#### b. Pengujian Hipotesis

##### 1) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara adalah

**Tabel 4.4. Uji Simultan ( Uji F) Model 1 ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.100	5	1.220	71.582	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.716	42	.017		
	Total	6.815	47			

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

b. Dependent Variable: y2

Sumber : Data diolah , 2021

Dari hasil Output SPSS, hasil uji Anova diperoleh F-hitung sebesar 71,582, dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian disimpulkan,  $p = 0.000 < \alpha = 0.05$ , bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

## 2) Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh secara parsial terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara adalah

**Tabel 4.5. Uji Parsial ( Uji t )**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.208	.219		.950	.347
x1	1.256	.115	.910	10.937	.000
x2	-.034	.190	-.015	-.180	.858
x3	.153	.178	.054	.863	.393
x4	-.266	.140	-.121	-1.905	.064
x5	-.379	.298	-.064	-1.271	.211

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh model persamaan 1 regresi berganda sebagai berikut;

$$\text{PDRB} = 0,208 - 1,256 \text{ RaKemKD} - 0,034 \text{ RaKetKD} + 0,153 \text{ REPAD} - 0,266 \text{ REPD} - 0,379 \text{ APPD}$$

Kemudian hasil uji parsial dalam penelitian ini adalah

- Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dengan t-hitung sebesar 10.937 dengan tingkat probabilitas 0.000. Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB.
- Variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) dengan t-hitung sebesar -0,180 dengan tingkat probabilitas 0,858. Maka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap PDRB.
- Variabel Rasio Efektivitas PAD ( $X_3$ ) dengan t-hitung sebesar 0,863 dengan tingkat probabilitas 0.393. Maka Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap PDRB.
- Variabel Rasio Efektivitas Pajak Daerah ( $X_4$ ) dengan t-hitung sebesar -1,905 dengan tingkat probabilitas 0,064. Maka Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap PDRB.
- Variabel Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah ( $X_5$ ) dengan t-hitung sebesar -1,271 dengan tingkat probabilitas 0,211. Maka Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap PDRB.

## 3) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. adalah

**Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi**  
Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.946 <sup>a</sup>	.895	.882	.131	.895	71.582	5	42	.000

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

b. Dependent Variable: y2

Sumber : Data diolah, 2021



Dari hasil output diatas, bahwa diperoleh nilai R Square sebesar 0,895 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa 88,20 % variabel PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah sedangkan sisanya 11,80% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti rasio-rasio keuangan daerah yang belum masuk dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Masalahnya besarnya belanja sama dengan pendapatan maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sehingga kita akan melihat sejauhmana kemampuan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara semenjak Otonomi Daerah dari tahun 1999 yang membuktikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri yaitu dalam memanfaatkan pendapatan dan belanja memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan berbagai aktivitas seperti perbaikan sarana dan pasarana. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB. Penelitian ini sejalan dengan Nih Lu (2014) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin mandiri keuangan daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tetapi efektivitas pengelolaan daerah masih rendah dan blm mencapai target pendapatan pajak daerah sehingga masih sedikit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini Luqman dkk (2011) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian ini bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap PDRB. Menunjukkan dampak dari pengelolaan pajak daerah yang belum optimal maka target pendapatan asli daerah belum tercapai. Karena ketergantungan keuangan daerah masih tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih rendah. Dengan menunjukkan bahwa 88,20 % variabel PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah

Pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara masih belum berhasil dalam otonomi daerah. Maksudnya masih tergantung kepada pusat berupa dana transfer karena minimnya pendapatan daerah yang didapat. Disisi lain alokasi dana pembangunan yang tersedia relatif terbatas maka pemerintah harus dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Maka Pemerintah harus dapat menumbuhkan investasi baru seluruh daerah pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara melalui pengalokasi dana penerimaan seperti pendapatan pemerintah kabupaten dan kota yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhannya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh negatif secara parsial terhadap PDRB. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap PDRB pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.
3. Dengan nilai 88,20 % variabel PDRB di jelaskan oleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah sedangkan sisanya 11,80% dijelaskan oleh faktor rasio-rasio keuangan daerah yang belum masuk dalam penelitian ini.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Kota dan Kabupaten perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju perkembangannya.
2. Membuat perencanaan pengelolaan keuangan daerah dengan program 3E (Efisien, Efektif dan Ekonomis) dalam memperdaya sumber daya alam masing-masing pemerintah kota dan kabupaten. Karena setiap pemerintah kota dan kabupaten memiliki bentuk geografis, kultur dan budaya yang berbeda dimana memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika pengelolaan tepat pada sasaran.
3. Memberikan Apresiasi kepada pegawai ASN yang mencapai target pengelolaan keuangan berupa peningkatan tunjangan , insentif, penghargaan dll, dan memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang tidak mampu mencapai target pengelolaan keuangan daerah berupa tidak ada penambahan tunjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Tri.Basuki dan Imamudin, Y.(2015). *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Dian, Sudrajat. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten bandung Barat*.Universitas Pasundan.
- I, Ketut. Arsa dan Nyoman, Djinar.Setiawin. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi BALI Tahun 2006 s.d 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* 17 Semarang. Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.

- Greydi, N. S, Paulus.K dan Tri, Oldy.R. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Luqman, Khakim. Iwan, Hermawan. Achmad, Solechan. dan VS, Tripriyo.PS.(2011). *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.
- Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marijana, Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. Institute of Public Finance, Zagreb.
- Magdalena, Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals*. The College of Economics and Social Sciences in Plock. Warsaw University of Technology Plock, Poland.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi E–Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Ni Nyoman.S, Made.S.U dan LN. Mahendra Yasa. (2015). *Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2337-3067.
- Ni, Luh.Nana.Putri.Ani dan A,A.N.B Dwirandra. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 .
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140-152.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Renny, Nur'aini. Desfitriani, Rooswhan.B.U (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Kota di Jawa Barat)*. Proceeding PESAT. Vol.5. ISSN:1858-2559.

[www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)